

BAB VI KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Kekuasaan dalam praktek produksi kurikulum dan buku teks menghadirkan praktek yang diskursif dan hegemonik. Penelitian ini karenanya mengarahkan pada satu kesimpulan tentang praktek kekuasaan yang dimanifestasikan melalui berbagai wacana dominan berupa keteraturan sosial, modernisasi dan pembangunan. Dalam pandangan Bourdieu wacana dominan tersebut menjadi *doxa* yang diperebutkan dalam ruang sosial. Studi ini menunjukkan bahwa peran teks kurikulum dalam menggiring siswa untuk berperilaku sesuai dengan pesan terselubung di balik teks tersebut. Mengacu kepada pembahasan studi ini kurikulum merupakan sebuah ruang yang terdiri atas seperangkat wacana yang diproduksi oleh kelompok dominan yang tidak terlepas dari kekuasaan internal maupun eksternal. Bourdieu benar, tidak ada subyek yang bebas dari kekuasaan dan tidak ada ruang sosial yang steril dari kekuasaan.

Kurikulum menjadi ruang strategi dalam praktek kekuasaan diskursif yang mana berhasil memproduksi dan mereproduksi berbagai wacana dominan dalam Kurikulum Sosiologi 2006 dan Kurikulum 1984. Oleh karena itu kesimpulan penelitian ini terletak pada dua hal penting. *Pertama*, Kurikulum 2006 dan juga Kurikulum 1984 sama-sama mengusung wacana dominan keteraturan sosial. Hal yang membedakan adalah konteks kekuasaan. Kurikulum 2006 merupakan kurikulum kedua pasca Orde Baru tumbang dan kurikulum pertama produk BSNP yang memegang kendali dan otoritas pendidikan nasional. Keteraturan sosial dalam kurikulum 2006 berada pada konteks masyarakat yang dianggap liberal, yang mana ideologi pembangunan tidak lagi menjadi *mainstream* pembangunan. Keteraturan sosial pada kurikulum 1984 berada pada saat Orde Baru sedang berjaya dengan berbagai keberhasilan pembangunan materialnya. Wacana masyarakat multikultural dalam kurikulum 2006 merupakan wacana dominan seiring dengan dinamika masyarakat yang berkembang, ditengah politik identitas yang beragam dalam masyarakat Indonesia. Wacana multikultural dihadapkan pada berbagai bentuk konflik etnis, agama, ekonomi dan politik yang meletup pasca Orde Baru. Rezim sangat berkepentingan dengan wacana ini adalah menumbuhkan kesadaran multikulturalisme

pada tingkat individu maupun komunitas agar dapat membangun persatuan untuk meminimalisir munculnya konflik. Selain keteraturan sosial, wacana dominan lainnya adalah modernisasi dan pembangunan. Dua wacana ini menjadi *mainstream* dalam buku teks sosiologi berdasarkan kurikulum 1984.

Kedua, berdasarkan analisa kepemilikan berbagai modal diantara BSNP dan penulis-penerbit, BSNP menempati posisi obyektif dominan dalam ranah kekuasaan kurikulum, sedangkan penulis-penerbit pada posisi obyektif marginal. Posisi obyektif tersebut juga mengindikasikan habitus yang berkembang diantara dua agen tersebut. Habitus BSNP adalah otoritas, intelektual dan akademik. Bourdieu percaya bahwa intelektual memiliki kekuasaan simbolik atau otoritas yang cukup di dalam pertarungan wacana. Habitus ini berkontribusi pada berbagai produk wacana yang dihasilkannya. Habitus penulis-penerbit lebih kepada idealisme dan selera pasar. Penerbit-penulis mensinergiskan artikulasi idealisme maupun basis wacana yang dimiliki penulis dengan berbagai pola penyesuaian terhadap tren dan perkembangan pasar. Dengan cara ini, penerbit dapat memiliki pasar yang sangat luas.

6.2 Implikasi Teoritik

Apple mengatakan bahwa kurikulum merupakan sebuah ruang yang mempertahankan dominasi ekonomi, politik dan nilai-nilai budaya. Pandangan ini menegaskan bahwa sekolah melalui berbagai prosedur dan standar akademiknya—termasuk didalamnya menggunakan kurikulum—memberikan basis legitimasi terhadap eksistensi kekuasaan ekonomi, politik dan ideologi. Pada level ini, Apple berupaya untuk lebih menjelaskan dinamika hegemoni, kekuasaan dan kontrol dalam kurikulum serta praktek-praktek pendidikan yang dilakukan guru. Fokusnya terletak pada bagaimana ideologi beroperasi dan menyebar membangun ke(tidak)sadaran diantara setiap individu. Pemikiran tersebut sejalan dengan konsepsi Giroux tentang kurikulum. Giroux mengatakan sekolah dengan berbagai program (baca: kurikulum) merupakan sebuah konstelasi dari berbagai ranah: ekonomi, sosial, institusi politik yang mana itu menjadi basis legitimasi dari terciptanya struktur kekuasaan. Meski tidak sesistematis Apple, Giroux tampaknya lebih banyak berbicara tentang terciptanya reproduksi sosial dan

ketimpangan ekonomi yang timbul akibat beroperasinya kekuasaan ekonomi-politik dalam sekolah melalui mekanisme kurikulum. Giroux menyebutkan selalu terjadi relasi dan akhirnya subordinasi antara sekolah dengan struktur ekonomi (pasar) di masyarakat.

Pandangan berbeda dijelaskan Torres. Torres sebagaimana mengutip Levin menempatkan kurikulum (dan juga organisasi sekolah, instruksi, metode pembelajaran) sebagai proses pendidikan dalam sebuah formasi kebijakan publik dalam ranah pendidikan. Torres menyebut dua faktor penting dalam formasi kebijakan publik yaitu pengaruh eksternal dan reformasi pendidikan-perencanaan pendidikan. Diantara dua faktor ini, Torres menjelaskan bahwa faktor eksternal berupa dimensi politik (politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, sejarah), hukum dan sumber-sumber anggaran, serta proses pendidikan dianggap lebih determinan dalam menempatkan pendidikan sebagai ranah penting dalam masyarakat. Pada konteks kurikulum sebagai bagian penting proses pendidikan, Torres menyebutnya dengan *social outcomes* yaitu *competition, literacy, political behavior, alienation* dan sebagainya. Analisa Torres dibandingkan Apple maupun Giroux memang lebih makro dan cenderung menempatkan kurikulum hanya sebagai salah satu bagian penting dalam formasi kebijakan pendidikan. Sementara itu Apple dan Giroux lebih fokus menempatkan kurikulum sebagai sebuah ranah (politik, ideologi, ekonomi dan budaya). Pada level inilah, terlihat perbedaan mendasar.

Penjelasan Apple dan Giroux tentang kurikulum sebagai ranah sebenarnya sudah dijelaskan oleh Bourdieu tentang konsepnya sekolah hanya sebagai ruang terciptanya reproduksi sosial dan reproduksi ekonomi. Konsep Bourdieu memang lebih komprehensif dibandingkan dengan pemikiran Apple, Giroux maupun Torres. Tesis Bourdieu tersebut ingin mengatakan bahwa berbagai dinamika yang terdapat di sekolah diproduksi oleh kurikulum. *Pertama*, meski Bourdieu tidak berbicara khusus tentang kurikulum, tetapi pesan yang ingin disampaikan sangat terlihat bahwa kurikulum menjadi ranah penting dalam keberadaan sekolah. *Kedua*, melalui kurikulum terjadi pertarungan kekuasaan agen-agen di dalamnya. Dalam hal ini Bourdieu kemudian mengintroduksi konsep *field*. Dengan kata lain, kurikulum jika mengacu kepada Bourdieu merupakan sebuah ranah kekuasaan.

Dari hasil studi diatas menunjukkan bahwa negara tengah menjalankan praktek kekuasaannya melalui penggunaan seperangkat mekanisme wacana yaitu dengan

pembentukan teks-teks pendidikan untuk menghasilkan berbagai kepatuhan berupa nilai, cara pandang dunia, dan sebagainya. Kurikulum sebagai bentuk kekuasaan digunakan negara dalam memproduksi berbagai cara pandang dunia yang harus sejalan dengan cara pandang negara, dalam hal ini BSNP sebagai agen dominan. Bourdieu memberikan gambaran hal-hal mendasar dalam hubungan antara struktur sekolah secara piramida dengan struktur negara dimana ujian nasional yang notabene merupakan produk BSNP sebagai alat untuk mendaki suatu struktur piramida tersebut, yang disebut sebagai *state magic* (sihir negara). Sekolah sebagai agen sosialisasi utama mentransformasikan suatu warisan kolektif dalam suatu alam ketidaksadaran individu.

Dalam konteks pertarungan kekuasaan sebagaimana dijelaskan dalam studi ini, perspektif Bourdieu dengan berbagai proposisinya relevan untuk menjelaskan praktek-praktek kontestasi antar agen dalam ranah kurikulum. Bourdieu memberikan sebuah gambaran umum bagaimana memahami produksi dan reproduksi wacana sebagai representasi praktek sosial. Berbagai wacana (teks kurikulum dan buku teks pelajaran) dalam pandangan Bourdieu bukanlah gejala yang spontan. Berbagai teks tersebut lahir dari seperangkat mekanisme yang diproduksi BSNP sebagai agen yang secara posisi sosial dominan, sebaliknya penerbit-penulis berada pada posisi marjinal. Dalam konteks itulah, berdasarkan konstruksi wacana dominan dalam kurikulum sosiologi SMA dan posisi dominan BSNP memberikan satu gambaran kepada kita bahwa Indonesia merupakan sebuah ranah pertarungan kekuasaan antara BSNP, penulis-penerbit dalam produksi kurikulum Sosiologi SMA. Baik BSNP maupun penerbit-penulis berupaya mengkontestasikan posisi obyektifnya melalui pemilikan modal.

Sebagaimana yang dijelaskan Bourdieu, proposisi penguasaan berbagai modal dan habitus bukanlah sesuatu yang deterministik. Menempatkan agen dengan berbagai modal yang dimilikinya sebagai satu pintu masuk dalam menentukan posisi obyektifnya tidaklah terlalu kaku dan deterministik. Penguasaan modal dalam sebuah ranah bersifat cair tidak selalu terstruktur oleh satu kepemilikan modal saja. Dalam studi ini, terlihat bahwa kepemilikan modal ekonomi tidak terlalu determinan dibandingkan dengan kepemilikan modal lain. Bahkan berdasarkan studi ini tampak yang menentukan posisi obyektif agen adalah modal sosial dan modal simbolik. Berdasarkan studi ini, perspektif Bourdieu---lagi-lagi---akan memberikan satu implikasi bahwa pertarungan kekuasaan

tersebut akan terus berjalan secara dinamis dalam sebuah ranah. Didalamnya terus berlangsung reproduksi wacana dominan oleh kelompok dominan, sementara kelompok marjinal terus mempertahankan posisinya dalam menghadapi dominasi tersebut. Pada level ini, perspektif Bourdieu sebagaimana dijelaskan dari studi ini dapat digunakan untuk membaca berbagai perubahan sosial.

Berdasarkan studi yang dilakukan, terdapat beberapa catatan kritis terhadap pemikiran Bourdieu. *Pertama*, pemikiran Bourdieu dapat dikelompokkan dalam aliran *constructivist structuralism* atau *structuralist constructivism* yang mengacu pada struktur-struktur objektif, terlepas dari kesadaran dan keinginan pelaku-pelaku, yang mampu mengarahkan dan sekaligus menghalangi praktik-praktik atau representasi mereka. Dengan menggunakan istilah konstruktivisme, Bourdieu menyatakan bahwa terdapat genesis sosial dari skema-skema persepsi, pemikiran, dan aksi, serta bagian lain dari struktur sosial.¹ Sebagaimana merujuk Claudia Strauss dan Naomi Quinn (selanjutnya Strauss-Quinn) yang mengkritik berbagai aliran seperti interpretivisme, pascastrukturalis dan pascamodern, materialisme historis, dan ahli-ahli kognitif lainnya dibahas satu demi satu. Kritik terhadap Bourdieu berkenaan dengan aspek psikologi yang hilang atau ditinggalkan dalam penjelasan-penjelasan tentang makna dan pemaknaan. Jika merujuk pada Straus-Quinn, kritik tersebut sebenarnya berada dalam diskursus kebudayaan yang selalu berkaitan dengan makna. Namun demikian, kritik tersebut dapat ditempatkan pada konsep-konsep kekuasaan Bourdieu sebagaimana juga direfleksikan dari studi yang dilakukan di bagian sebelumnya.

Merujuk kepada Strauss-Quinn pada dasarnya menganggap pemikiran Bourdieu paling baik dalam menjelaskan masalah makna dan tindakan. Secara khusus, mereka mengacu ke konsep habitus Bourdieu yang dianggap sebagai pengetahuan yang terinternalisasi dalam diri individu, namun tidak selalu dalam bentuk yang pasti karena diperoleh melalui praktek sehari-hari yang bisa bervariasi dalam batas-batas tertentu.² Gagasan Bourdieu bahwa habitus terstruktur oleh pengalaman seseorang dengan obyek dan praktek-praktek yang ia temui sehari-hari, dan bahwa sebaliknya habitus tersebut

¹Turner, Jonathan H (1995), *The Structure of Sociological Theory* (Fifth Edition), California:Wadsworth Publishing Company, hal. 508-509

²Strauss, Claudia dan Quinn, Naomi (1997), *A Cognitive Theory of Cultural Meaning*. Cambridge: Cambridge University Press, hal.44.

memberi struktur pada kebudayaan melalui praktek-praktek yang diwujudkan individu, sesungguhnya memperlihatkan interaksi antara struktur-struktur intrapersonal dan ekstrapersonal yang dimaksudkan oleh Strauss-Quinn. Berdasarkan penjelasan tersebut terdapat beberapa kelemahan dalam uraian Bourdieu, misalnya ketika ia mengatakan bahwa pengetahuan dalam habitus tidak diungkapkan (*unsayable* atau *doxa*) karena memang tidak bisa diungkapkan. Bourdieu tidak dapat mengkontraskan praktik sosial dengan pemahaman yang dipelajarinya.³ Bourdieu kurang tepat dalam mengatakan bahwa pengenalan (*familiarity*) dengan praktek-praktek sosial cukup untuk habitus. Mereka mengatakan bahwa tidak semua keteraturan dalam praktek-praktek sosial teringat oleh individu, karena individu tersebut mempunyai motivasi-motivasi yang mengarahkan perhatiannya pada hal-hal tertentu saja.

Teori-teori makna yang dibahas oleh Strauss-Quinn banyak dikemukakan oleh pengikut pascastukturalisme dan pascamodernisme. Kedua aliran pemikiran ini melakukan penolakan terhadap berbagai penjelasan yang bersifat psikologis. Menurut Strauss-Quinn, aspek psikologisme ditolak karena ada kekhawatiran bahwa penjelasan tentang makna yang terkait pada proses-proses internal dalam diri manusia akan menghasilkan kesimpulan makna sebagai sesuatu yang statis. Sementara Strauss-Quinn berada pada posisi bahwa penjelasan kebudayaan dan makna berkaitan dengan aspek psikologisme. Strauss-Quinn beserta kelompok ini melihat bahwa kebudayaan senantiasa dikonstruksi oleh para pelaku, untuk kepentingan-kepentingan politis yang muncul sesaat. Ringkasnya, menurut Strauss-Quinn, konsep habitus Bourdieu memberikan sebuah harapan tetapi tidak memuaskan dalam penjelasannya. Kritik Strauss-Quinn terhadap Bourdieu memperlihatkan pijakan mereka pada teori-teori yang berkembang dalam psikologi, khususnya teori-teori tentang proses belajar.

Konsepsi ranah yang dijelaskan Bourdieu sebagai arena kompetisi mirip dengan persaingan dalam perdagangan antarindividu atau kepentingan⁴. Analogi ranah dan pasar dianggapnya terlalu mengesampingkan bentuk-bentuk hubungan lain yang juga penting dalam masyarakat. Hubungan itu antara lain berupa berbagai pengalaman seperti persahabatan, cinta, kasih sayang dan sebagainya. Tak kalah pentingnya juga konsep

³ Ibid hal. 45.

⁴ Haryatmoko, op.cit hal. 22

habitus terlalu menitikberatkan determinisme budaya kelas asalnya, status sosialnya dan kedudukannya dalam hirarki sosial. Bourdieu seolah menganggap habitus berfungsi seperti program yang memungkinkan adanya kreativitas. Meski demikian, pelaku sosial tetaplah menjadi sumber kebebasan politik dan perubahan sosial. Pemikiran-pemikiran Bourdieu juga dianggap Haryatmoko---seperti mengutip Bonnewitz---terlalu menekankan pada mekanisme-mekanisme dan strategi-strategi reproduksi, sehingga pemikirannya tidak memberikan analisa yang relevan bagi perubahan sosial. Faktor sejarah diabaikan dalam analisa Bourdieu.

6.3 Implikasi Praktis

Setelah melakukan kajian mendalam mengenai kurikulum sebagai ranah kekuasaan, studi ini perlu memberikan beberapa implikasi teoritik terkait dengan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kurikulum terutama posisi BSNP yang memiliki posisi obyektif dominan berdasarkan studi ini. *Pertama*, penyusunan kebijakan kurikulum meski melibatkan legislatif (DPR) melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) harus semaksimal mungkin melibatkan partisipasi berbagai *stakeholder* pendidikan. Optimalisasi ini menjadi sangat penting dalam dua hal. *Pertama*, meningkatkan kontrol dan partisipasi dari masyarakat akar rumput dapat memberikan penguatan-penguatan terhadap substansi kurikulum dalam UU tersebut. Penguatan tersebut dapat berupa aspirasi tentang visi kurikulum yang akan disusun. *Kedua*, sebagaimana sudah dijelaskan pada poin sebelumnya, adanya kontrol dan partisipasi *multi stakeholder* berupaya memberikan wacana tanding terhadap muatan kurikulum yang akan diproduksi, bahwa kurikulum tersebut tidak semata-mata diproduksi atas kepentingan dan 'selera' penguasa, tetapi kepentingan *stakeholder* dapat diakomodir melalui muatan kurikulum tersebut. Sejauh ini memang---secara prosedural---pihak DPR berupaya melibatkan *stakeholder* yang lain, tetapi itu dilakukan tidak dalam konteks sinergis. Melainkan lebih kepada prosedur yang harus ditempuh oleh DPR sebagai pemegang otoritas legislatif. DPR dalam hal ini bisa melibatkan dua agen penting yaitu universitas dan NGO dalam merumuskan muatan dan visi kurikulum. Hal tersebut bisa

dilakukan dengan cara membuat semacam kelompok kerja yang *ad hoc* (semacam *think tank*) di beberapa daerah yang memiliki universitas. Dengan cara ini, paling tidak berbagai penguatan gagasan, ide dan visi kurikulum dapat digali melalui serangkaian *round table discussion* yang intensif serta melalui pemaparan publik.

Kedua, sebagaimana menjadi fokus utama studi ini mengenai posisi obyektif BSNP yang dominan dalam ranah kurikulum pasca diberlakukannya UU No. 20 Tahun 2003 dengan kekuasaan simbolik yang dimilikinya, perlu ditinjau ulang secara legal formal keberadaannya. Hal tersebut bisa dilakukan dengan *legal action* terhadap aturan yang melegitimasi keberadaan BSNP, dalam hal ini PP No. 19/2005. Sejauh ini dengan otoritas akademik yang dimilikinya---melalui produksi Standar Nasional Pendidikan---BSNP menjadi satu kekuasaan baru pasca Orde Baru dalam ranah pendidikan. Berbagai kebijakan seperti diterapkannya Ujian Nasional (UN), penentuan instrumen dan penilaian buku pelajaran (yang sangat *rigid*) hanyalah menjadi beberapa contoh dari kebijakan yang dianggap kontroversial oleh berbagai kalangan. *Ketiga*, berdasarkan temuan lapangan dalam penilaian buku pelajaran Sosiologi (dan sangat mungkin buku-buku pelajaran lainnya) melalui BSNP terdapat praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) untuk meloloskan buku-buku pelajaran dari penerbit tertentu. Praktek tersebut dilakukan dengan memberikan sejumlah uang kepada oknum-oknum tertentu yang terlibat dalam penilaian buku pelajaran. Bahkan, praktek tersebut sudah dianggap kelaziman oleh sebagian kalangan pada setiap penilaian buku. Implikasinya, sulit mendapatkan buku pelajaran yang berkualitas dari segi isi maupun penampilan. Paling tidak perlu ada lembaga independen yang mampu mengontrol praktek-praktek tersebut agar dapat diminimalisir. Dengan adanya kontrol dari lembaga independen tersebut, upaya menghasilkan buku-buku pelajaran yang berkualitas dapat dimulai.